

Loket Stasiun Sukabumi Dirusak Calon Penumpang

SUKABUMI (IM) - KAI Daop 1 Jakarta mengambil tindakan tegas atas perbuatan calon penumpang yang melakukan kerusakan loket di Stasiun Sukabumi. Calon penumpang langsung dibawa ke Mapolsek Sukabumi untuk diproses secara hukum.

Kahumas KAI Daop 1 Jakarta, Eva Chairunisa mengatakan kejadian bermula saat calon penumpang berinisial IT hendak melakukan perjalanan KA Lokal Pangrango-Sukabumi.

IT saat itu memiliki kode booking dengan jumlah penumpang lima orang namun ada dua penumpang yang tidak memenuhi syarat vaksinasi.

"Sesuai aturan maka kedua nama tersebut tidak diizinkan melanjutkan perjalanan dan diarahkan ke loket," kata Eva, Jumat (9/12).

Menurut Eva, calon penumpang tersebut tidak terima aturan yang berlaku. Saat itu juga calon penumpang langsung mendorong dan memecahkan kaca loket.

Daop 1 Jakarta pun mengambil tindakan tegas atas perbuatan penumpang.

Pelaku langsung diamankan ke Polsek Cikole, Sukabumi untuk diproses hukum.

"Pelaku telah diamankan oleh petugas dan saat ini telah dibawa ke Polsek Cikole, Sukabumi untuk diproses secara hukum," tegas dia.

Meski ada kejadian ini KAI memastikan seluruh pelayanan di Stasiun Sukabumi dapat berjalan lancar. Stasiun Sukabumi pun masih melakukan pelayanan menggunakan dua loket lainnya yang tersedia.

KAI Daop 1 Jakarta juga menegaskan bahwa kelengkapan data vaksin merupakan salah satu persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh calon pengguna jasa sesuai ketentuan pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Satgas Covid dan Kementerian Perhubungan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 agar perjalanan KA yang aman, nyaman dan sehat dapat diwujudkan.

"Seluruh calon pengguna diminta untuk menghargai petugas yang sedang menjalankan kewajiban dan tugasnya baik di stasiun dan di atas KA," pengukasnya. ● pra

Disdik Jabar Raih Penghargaan Badan Publik Kategori OPD Informatif dari KIP Jabar



Kadisdik Jabar, Dedi Supani saat menerima Piagam Penghargaan sebagai Badan Publik Kategori OPD "Informatif" dari KIP Jabar.

BANDUNG (IM) - Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) "Informatif" dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar.

Piagam penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi dalam acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2022 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/12).

Kadisdik Jabar, Dedi Supandi yang menerima penghargaan tersebut mengatakan, penghargaan ini merupakan bukti kemajuan Disdik Jabar dalam keterbukaan informasi. "Ini jadi bagian yang terus kita tingkatkan dalam pelayanan keterbukaan informasi untuk masyarakat."

Ia menambahkan, Disdik Jabar adalah satu dari 17 OPD di Jabar yang meraih

kualifikasi informatif dari KIP Jabar.

Ketua KIP Jabar, Ijeng Faisal menuturkan, kualifikasi badan publik dalam pelayanan keterbukaan informasi publik terbagi menjadi 5, yakni informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Menurutnya, jumlah badan publik yang informatif di Jabar bertambah signifikan dari tahun 2021. Mulai dari OPD Jabar (dari 8 menjadi 17), kabupaten/kota (dari 4 menjadi 3), dan partai politik (dari 4 menjadi 10).

Ijeng pun mendorong seluruh lembaga publik agar menjadikan keterbukaan informasi bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga budaya dalam berbangsa dan bernegara. "Karena, ini media untuk mewujudkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah," ucapnya.

Acara pengumuman tersebut pun dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum. ● lys

Produk Petani Milenial Jabar Mulai Merambah Pusat Perbelanjaan

BANDUNG (IM) - Produk dari para petani milenial Jawa Barat seperti madu, kopi, gula aren, abon, dan jus jeruk nipis, mulai dipasarkan di pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jawa Barat, yakni di Cihampelas Walk (Ciwalk) lewat Gerai Petani Milenial. "Hari ini Alhamdulillah kita meresmikan Gerai Petani Milenial, produk-produk petani milenial yang sudah dilatih sejak tahun 2019," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Indra Sofyan, sesuai peresmian Gerai Petani Milenial, di Bandung, Jumat (9/12).

Program Petani milenial adalah program pengembangan untuk para petani muda Jawa Barat di berbagai komoditas agrikultur.

Indra mengatakan kehadiran Gerai Petani Milenial adalah hasil kolaborasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didukung oleh DPRD hingga pembeli.

Dia mengatakan total Gerai Petani Milenial tersebut ada di tiga lokasi pertama di Cihampelas Walk Bandung, Stasiun Kereta Api, dan Botani Square Bogor.

"Kami sengaja memilih

di lokasi yang sangat strategis yaitu yang bisa langsung dilihat oleh para calon pembeli atau konsumen, ini salah satu keuntungannya," kata dia.

Produk Petani Milenial yang ditampilkan di gerai tersebut telah dikurasi oleh OPD terkait dibantu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Karena tidak semua produknya bisa masuk ke sini karena sudah melalui hasil kurasi, bahkan yang mengkurasinya itu kami dibantu atau mengundang dari Aprindo," kata dia.

Dengan hadirnya produk dari Petani Milenial di gerai tersebut, kata Indra, menunjukkan bahwa produk mereka sudah bisa dipasarkan dan bersaing dengan produk dari pengusaha lainnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira berharap Program Petani Milenial bisa terus dikembangkan oleh Pemprov Jawa Barat. "Kita sedang mencoba menciptakan satu generasi unggul, khususnya di bidang ketahanan pangan. Sehingga suatu saat kita tidak kekurangan petani," kata Yunandar. ● pra

8 | Nusanantara

IDN/ANTARA



EVAKUASI KORBAN LEDAKAN TAMBANG BATU BARA SAWAHLUNTO

Petugas gabungan mengevakuasi jenazah pekerja korban ledakan tambang batu bara yang dikelola PT Nusa Alam Lestari (PT NAL) di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, Jumat (9/12). Ledakan tersebut terjadi di lubang tambang SD C2 atau lori 2 yang dikelola PT NAL (Nusa Alam Lestari) pada Jumat (9/12) pagi dan mengakibatkan belasan pekerja menjadi korban dan terjebak di lokasi kejadian.

Plt Bupati Bogor Ingatkan Dana Desa dan Promosi Jabatan Rawan Korupsi

Selain penggunaan dana desa, sejumlah sektor di Kabupaten Bogor yang berpotensi dikorupsi, terkait dengan mutasi dan promosi jabatan. Sektor lainnya yang rawan dikorupsi yaitu pengadaan barang dan jasa. Hal itu perlu diwaspadai, kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

CIBINONG (IM) - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghadiri acara Hari Peringatan Anti Korupsi Sedunia

(Hakordia) 2022 secara daring. Sebelum menghadiri acara itu, pihaknya telah menggelar sosialisasi terkait potensi korupsi

dalam penggunaan dana desa.

"Jadi dari rangkaian di Bogor itu diawali beberapa minggu lalu diawali webinar dengan para Kades terkait penggunaan dana desa. Untuk bagaimana pencegahan korupsi bukan hanya di dinas, di desa juga," kata Iwan kepada wartawan di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jumat (9/12).

"Makanya dari dinas, inspektoral, bagaimana kita melakukan upaya pencegahan terhadap para kepala desa (kades). Karena kalau dihitung Rp 1,5 triliun itu uang yang

memang di desa. Makanya itu juga perlu pengawasan," sambungnya.

Selain penggunaan dana desa, Iwan menjelaskan sejumlah sektor di Kabupaten Bogor yang berpotensi dikorupsi. Pertama, terkait dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkup pemerintah daerah (Pemda).

"Semua ya bukan hanya di Kabupaten Bogor, kalau lihat dari struktur permasalahan yang domainnya ada di KPK, ya ada dua. Satu, tentang promosi dan mutasi jabatan itu rentan. Dari kasus-kasus ada setoran, menjual posisi," ujarnya.

Kedua, sektor yang rawan dikorupsi yaitu pengadaan barang dan jasa. Hal itu yang menurutnya perlu diwaspadai.

Selain itu, Iwan juga menyoroti terkait dengan perizinan. Dia mengingatkan dengan tegas kepada dinas-dinas

di Kabupaten Bogor soal itu.

"Dan juga soal perizinan juga harus dilihat. Jangan seolah-olah perizinan ini tertutup. Perizinan ini akan terbuka bila mana ada masalah," imbuhnya.

"Saya ingatkan kepada seluruh dinas jangan main-main dengan perizinan yang mana tidak dilihat oleh publik. Tapi kalau ada masalah, mudah itu untuk melusuri," tambahnya.

Beberapa aturan, menurutnya kerap dilanggar dan diatur sedemikian rupa. Dia sempat memanggil dinas-dinas yang berurusan dengan perizinan dan mengingatkan mereka soal transparansi kepada pimpinan.

"Walaupun kewenangannya ada diserahkan kepada dinas. Makanya kalau perizinan yang besar ini tidak boleh diserahkan ke dinas tapi pimpinan tidak diminta arahan," pungkasnya. ● gio

Warga Surabaya Diminta Tidak Asal Mendaftar Lewat Aplikasi E-Health

SUEABAYA (IM) - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meminta warga Kota Pahlawan, Jatim, agar tidak asal mendaftar lalu membatalkan untuk berobat di dua RSUD milik Pemkot

melalui aplikasi e-health dengan tujuan agar tidak merugikan pasien lain.

Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat (9/12), mengatakan, saat mengecek pelayanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) pada Kamis (8/12), pihaknya menemukan ada 50 warga yang mengisi sistem pendaftaran pelayanan selama 30 hari penuh melalui e-health, namun tidak datang pada hari dan waktu yang telah ditentukan.

"Saya bilang kami bisa lihat itu lewat aplikasi, blokir orangnya. Ternyata diblokir itu ada 50 orang dan orangnya datang minta dibuka blokir. Saya minta (orang itu) untuk buat pernyataan, kalau saya tidak datang maka saya membatalkan. Kalau ternyata saya tidak datang dan tidak membatalkan, maka saya siap diblokir sampai satu bulan," kata Cak Eri.

Melalui pola tersebut, Cak Eri berharap, ke depan warga atau calon pasien tidak asal mendaftar lalu mem-

batalkan. Sebab, kata dia, hal tersebut justru akan merugikan orang lain yang benar-benar ingin mendapatkan pelayanan di RSUD BDH.

"Kalau dia mendaftar begitu, maka dia merugikan orang lain yang mau daftar nomornya jadi ke belakang. Nah ini apa, ayo sama-sama Surabaya ini guyub-rukun, jangan merugikan orang lain dengan pola yang kami buat, bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita," ujar dia.

Cak Eri juga mengatakan, pihaknya akan kembali mengembangkan aplikasi e-health. Sebab, dari hasil evaluasinya di lapangan, sistem pendaftaran daring ini belum dilengkapi dengan barcode ketika tidak di-print oleh calon pasien.

"Ini lagi kami buat untuk barcodenya. Nah untuk (sementara) mempercepat itu, saya minta yang tugas di luar dengan name tagnya dia (pasien) dimasukkan, maka dia ada pilihan mana saja (poli atau dokter), kalau memang jamnya masuk itu diklik untuk mempercepat," kata dia.

Selain itu, Cak Eri juga berpesan kepada para pengunjung atau pasien yang datang agar dapat menyesuaikan dengan jam antrean karena beberapa kali me-

memui warga yang mendaftar antrean untuk mendapatkan layanan pukul 10.00 WIB namun datangnya pukul 06.00 WIB.

"Ini yang terjadi sehingga pelayanan jadi kacau, seakan-akan jadi lama. Tapi Alhamdulillah sekarang setelah ini dijalankan, posisinya jauh berkurang, maka jam 11.00 WIB sudah pada selesai, karena lebih teratur orangnya," kata dia.

Cak Eri juga menyarankan, agar manajemen RSUD BDH untuk memasang televisi di ruangan tunggu. Dengan begitu, warga yang datang tidak bosan saat menunggu giliran mendapatkan pelayanan.

"Sama dengan RSUD Dr Soewandhie, nanti RSUD BDH juga dikasih TV agar tidak stres saat menunggu," ujar dia.

Cak Eri juga meminta supaya ruangan di RSUD BDH dilakukan penataan dengan penambahan hiasan seperti di antaranya menyesuaikan jumlah kursi pengunjung serta pemasangan hiasan dinding.

"Sehingga ruangan ini akan jadi lebih luas, kami bisa berikan tulisan-tulisan atau hiasan dinding sehingga orang berobat akan merasa nyaman," kata Cak Eri. ● pra

Elly Yasin Optimistis KCJB Jadi Lokomotif Pertumbuhan Perekonomian Nasional

BOGOR (IM) - Menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggunakan kereta api dengan kecepatan mencapai 350 kilo meter per jam, Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin mengapresiasi pembangunan kereta cepat rute Jakarta-Bandung (KCJB).

Elly Rachmat Yasin yang merupakan Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor mengatakan adanya proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah tersebut sudah bermanfaat bagi masyarakat.

"Tercipta banyak lapangan kerja. Proses konstruksi infrastruktur kereta cepat telah menyerap tenaga kerja hingga 15 ribuan orang. Pada saat beroperasi nanti, kereta cepat ini juga memerlukan banyak tenaga kerja. Pembangunan di daerah sekitarnya pun akan banyak menyerap tenaga kerja," kata Elly Rachmat Yasin kepada Wartawan di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor dalam masa resesnya, Kamis (8/11).

Elly Rachmat Yasin menerangkan, pembangunan KCJB dapat menjadi lokomotif perekonomian secara nasional. "Kami berharap, pembangunan kereta cepat yang diperkirakan selesai Maret 2023 nanti akan mendorong terciptanya titik-titik ekonomi baru sehingga mengangkat dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya," terang Elly.

Ia menambahkan, pembangunan jalur moda transportasi massal baru itu juga akan berdampak terhadap sektor lain.

"Kehadiran kereta cepat ini akan mendorong sektor pariwisata baru. Akan muncul juga kota-kota baru, seperti di perkebunan Walini di Cikalongay, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu stasiun antar jemput penumpang sebagai kota penyangga dan kawasan ekonomi modern,"

tambahnya.

Elly menjelaskan, jalur KCJB tersebut pastinya memangkas waktu perjalanan dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya.

"Bandung dan sekitarnya yang selama ini menyimpan daya tarik wisata, fesyen dan sejarah juga kuliner akan lebih mudah dijangkau oleh pengunjung. Bagi pebisnis, jangkauan Jakarta juga tidak butuh waktu lama. Begitu pun penggemar moda kereta api dapat menikmati sarana transportasi yang ideal dan fleksibel, serta mudah mengaksesnya," jelas Elly.

Lebih lanjut ibu tiga orang anak ini mengungkapkan, bahwa tak sedikit perusahaan plat merah skala nasional yang dapat berkontribusi atas adanya KCJB tersebut.

"Terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Wijaya Karya sebagai perusahaan konstruksi, PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai pemilik mayoritas lahan, Jasa Marga yang berpengalaman mengelola jasa asuransi perjalanan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang saat ini menjadi pimpinan proyek. Mereka semua berinvestasi, jadi bukan program bantuan, tapi murni bisnis dengan skema business to business (B2B)," ungkap Elly.

Selain itu, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian juga berpotensi meningkat atas terbangunnya akses kereta api cepat yang masih dalam pengerjaan.

"BUMN yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. Mereka bisa membentuk holding pangan atau disebut ID FOOD bergerak dalam bidang pertanian dan agroindustri, peternakan dan perikanan, serta perdagangan dan logistik. Kami mengharapkan kemajuan teknologi dan transportasi di Indonesia, khususnya dengan adanya kereta cepat juga mendorong kemajuan di sektor pertanian," tukasnya. ● pra



BUDI DAYA IKAN LELE DENGAN SISTEM BIOFLOK

Anggota Kelompok Budi daya Ikan (Pokdakan) Harkat memanen ikan lele sangkuriang (clarias gariepinus) yang dibudidayakan dengan sistem bioflok di Harkat Farm House, Kelurahan Cimuhapkar, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/12). Budi daya ikan lele yang merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mampu menghasilkan sebanyak 1 ton ikan lele yang kemudian dipasarkan melalui media sosial dengan harga jual Rp25 ribu per kilogram.